VOL. 03, NO. 04, 2026
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA LAMBELU KECAMATAN BUMI RAYA KABUPATEN MOROWALI

Rini Andiny Saputri[1)], Muzakir Tawil[2)], Muhammad Afandi[3)].

[1] **Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako**
riniandinysaputri07@gmail.com
[2] **Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako**
tawilmute@gmail.com
[3] **Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako**
fandisupra666@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan padat karya tunai di desa lambelu sebagai salah satu program pemerintah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori model implementasi kebijakan oleh George C. Edward III dengan empat indikator utama yaitu Komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap-sikap dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap 8 informan yang terdiri atas kepala desa, tokoh masyarakat, masyarakat, dan tokoh pemuda karang taruna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari aspek komunikasi, yang mana sosialisasi program kepada masyarakat masih terbatas, sehingga sebagian masyarakat, khususnya kelompok sasaran seperti masyarakat miskin dan penganggur, kurang memahami secara jelas tujuan, mekanisme, serta kriteria penerima manfaat program Padat Karya Tunai. Kondisi ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dan munculnya persepsi ketidakmerataan dalam pelaksanaan program. Sumber daya menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia sudah ada, namun pemanfaatannya belum maksimal dan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan program, kurangnya tenaga pendukung menyebabkan pelaksanaan Padat Karya Tunai belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran secara adil dan merata, serta anggaran yang digunakan cukup terbatas melihat banyaknya program yang harus dijalankan, Disposisi masih belum sepenuhnya mencerminkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip Padat Karya Tunai, terutama prinsip inklusivitas dan keberpihakan kepada masyarakat miskin dan penganggur. Hal ini terlihat dari proses penentuan peserta kegiatan yang belum sepenuhnya transparan dan masih dipengaruhi oleh pertimbangan tertentu di luar kriteria kebijakan. Serta Struktur birokrasi yang dalam pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Lambelu masih menghadapi kendala, terutama dalam hal prosedur dan pembagian tugas. Struktur birokrasi yang ada belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan program secara efektif dan partisipatif, sehingga pengawasan serta koordinasi antar pihak terkait belum berjalan secara optimal.

Kata Kunci: Padat Karya Tunai, Implementasi, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi

VOL. 03, NO. 04, 2026
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the Cash-Intensive Labor Program policy in Lambelu Village as a government program. The theory used in this study is the policy implementation model theory by George C. Edward III, with four main indicators: communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure. This study used a qualitative approach with data collection through in-depth interviews with eight informants: the village head, community leaders, community members, and youth leaders from the youth organization (Karung Taruna). The research results show that the program has not been running well yet. This is evident from the communication aspect, where program socialization to the community is still limited, resulting in some residents, particularly target groups such as the poor and the unemployed, lacking a clear understanding of the objectives, mechanisms, and beneficiary criteria of the Cash-Intensive Labor Program. This situation has resulted in low community participation and a perception of inequality in program implementation. While human resources are available, their utilization has not been maximized, and the capacity of village officials to manage the program is limited. The lack of supporting staff has prevented the implementation of the Cash-for-Work program from reaching all target groups fairly and equitably. The budget is quite limited considering the large number of programs to be implemented. The disposition of implementers still does not fully reflect a strong commitment to the principles of the Cash-for-Work program, particularly the principles of inclusivity and support for the poor and the unemployed. This is evident in the process of selecting program participants, which is not fully transparent and is still influenced by certain considerations outside the policy criteria. Furthermore, the bureaucratic structure in Lambelu Village still faces obstacles in implementing the Cash-for-Work program, particularly in terms of procedures and task allocation. The existing bureaucratic structure does not fully support effective and participatory program implementation, resulting in suboptimal oversight and coordination between relevant parties.

Keywords: Cash-for Work Program, Implementation, Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure

Submisi: 07-10-2026
Diterima: 09-10-2026
Dipublikasikan: 11-11-2026

VOL. 03, NO. 04, 2026
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

PENDAHULUAN

Program Padat Karya Tunai (PKT) merupakan salah satu kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya percepatan pembangunan desa sekaligus pemberdayaan masyarakat miskin. Program ini diarahkan untuk menyerap tenaga kerja lokal, khususnya masyarakat miskin atau kurang mampu, penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, serta kelompok marginal lainnya. Melalui pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal, Padat Karya Tunai diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan pendapatan masyarakat, menurunkan angka pengangguran, serta berkontribusi terhadap penurunan angka stunting di desa**.**

Ketentuan teknis pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang salah satunya mewajibkan pengalokasian anggaran upah kerja paling sedikit 50% dari total biaya setiap kegiatan Padat Karya Tunai. Upah kerja tersebut dibayarkan secara langsung kepada masyarakat desa yang terlibat, dengan mengutamakan sistem pembayaran harian, sebagai upaya memastikan tersedianya pendapatan segera yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pokok masyarakat.

Program penanggulangan kemiskinan ini secara khusus di tuangkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 serta Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022 menegaskan bahwa Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada penanggulangan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, melalui penyediaan lapangan kerja yang diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta kelompok masyarakat marginal lainnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan terdiri dari Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Masyarakat, dan Tokoh Pemuda Karang Taruna. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis Data yang dilakukan melalui model interaktif menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014) terdiri atas pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai Di Desa Lambelu Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali dengan menggunakan Teori George C. Edward III (dalam Agustino, 2016:136-141) telah dilaksanakan melalui 4 indikator Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Pada indikator Komunikasi penyampaian informasi telah dilakukan, namun belum berjalan secara optimal. Pemerintah desa telah melakukan sosialisasi melalui musyawarah desa, musyawarah dusun, serta penyampaian langsung oleh perangkat desa. Masyarakat

pada umumnya telah mengetahui adanya program tersebut, namun pemahaman terhadap tujuan, mekanisme pelaksanaan, serta kriteria penerima manfaat masih belum merata.

Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan masih terbatas, sehingga sebagian masyarakat, khususnya kelompok sasaran seperti masyarakat miskin dan penganggur, belum sepenuhnya memahami kebijakan. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat serta munculnya persepsi ketidakmerataan dalam pelaksanaan program.

Pada indikator Sumber Daya belum berjalan secara optimal. Ketersediaan sumber daya manusia secara umum sudah ada, namun pemanfaatannya belum maksimal. Kapasitas aparatur desa dalam mengelola program masih perlu ditingkatkan, serta jumlah tenaga pendukung yang terbatas menyebabkan pelaksanaan kegiatan belum mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran secara merata.

Keterbatasan anggaran yang tersedia, di tengah banyaknya program desa yang harus dijalankan, turut mempengaruhi pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan sumber daya belum sepenuhnya memadai dalam mendukung implementasi kebijakan secara menyeluruh.

Pada indikator Disposisi sikap pelaksana belum sepenuhnya mencerminkan komitmen yang kuat terhadap prinsip kebijakan. Meskipun terdapat keterlibatan aktif pemerintah desa dan pelaksanaan program yang dilakukan secara rutin, namun dalam praktiknya masih ditemukan bahwa prinsip inklusivitas dan keberpihakan kepada masyarakat miskin dan penganggur belum sepenuhnya terwujud.

Hal ini terlihat dari proses penentuan peserta kegiatan yang belum sepenuhnya transparan dan masih dipengaruhi oleh pertimbangan tertentu di luar kriteria yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa disposisi pelaksana masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi belum optimalnya implementasi kebijakan.

Pada indikator Struktur Birokrasi Lambelu telah dilaksanakan dengan mengacu pada prosedur yang ada, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Pemerintah desa telah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan melaksanakan tahapan perencanaan melalui musyawarah desa.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat permasalahan dalam pembagian tugas, prosedur pelaksanaan, serta koordinasi antar pelaksana. Struktur birokrasi yang ada belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan program secara partisipatif dan terkoordinasi, sehingga pengawasan dan pelaksanaan kegiatan di lapangan belum berjalan secara maksimal.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian terhadap fokus kajian penelitian yaitu Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai Di Desa Lambelu Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali, dengan menggunakan teori dari George C. Edward III (dalam Agustino, 2016:136-141) yang meliputi aspek Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi, maka dapat disimpulkan Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai Di Desa Lambelu Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali yaitu:

Komunikasi program belum berjalan secara optimal karena penyampaian informasi belum merata dan pemahaman masyarakat terhadap tujuan, mekanisme, serta

kriteria penerima manfaat masih terbatas. Kondisi ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dan munculnya persepsi ketidakmerataan dalam pelaksanaan program.

Sumber Daya Program belum berjalan secara optimal karena keterbatasan kapasitas aparatur desa, jumlah tenaga pendukung, serta anggaran yang tersedia. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan program Padat Karya Tunai belum mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran secara merata.

Disposisi Porgram belum sepenuhnya berjalan secara optimal karena komitmen pelaksana dalam menerapkan prinsip transparansi, inklusivitas, dan keberpihakan kepada masyarakat miskin serta penganggur masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari penentuan peserta kegiatan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Struktur Birokrasi belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kendala dalam pembagian tugas, prosedur pelaksanaan, dan koordinasi antar pelaksana. Hal ini menyebabkan pelaksanaan serta pengawasan program Padat Karya Tunai belum berjalan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Aan Komariah dan Djama'an Satori. (2014). Metedologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabetha.

Abdul Wahab, Solichin. 2005. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara

Agustino, L. (2016). Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). Alfabeta.

Albar, R., & Syamsudin. (2024). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (OKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, *8*(1), 51–64.

Aneta, A, (2010). Implementasi Kebijakan Program Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo, Jurnal Administrasi Publik, 1(1)

Budiasa, A. G. R., Raka, A. A. G., & Mardika, I. M. (2019). Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) Pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, *4*(2), 71–82. https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration

Bungin, Burhan. 2013. Metode penelitian sosial & ekonomi: format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan, publik, komunikasi, manajemen, dan pemasara edisi pertama. Jakarta: kencana prenada media goup.

Grindle, Merilee S., 1998, Politics and Policy Implementation in The Third World, New Jersey: Princeton University Press.

Husda, N. E. (2023). *Metodologi Penelitian : Kualitatif , Kuantitatif dan Research and Development (R & D)* (Issue September).

Islamy, Irfan. 2002. *Prinsip-Prinsip perumusan Kebijaksanaan Negara.* Bumi Aksara, Jakarta.

Munanzar, M. A. (2020). *Analisis Budaya Organisasi dan Kualitas Pelayanan Publik*

(Studi pada Puskesmas Kuta Makmur). pp 1-150.

Paraya, Y. P., Yohanes, Y., & Apriyanto, D. (2022). Implementasi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kebijakan Program Padat Karya Tunai Di Desa Rasau Jaya Satu Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. *PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal)*, *11*(2), 1–16.

Pasolong. Harbani., (2013). Teori Administrasi Publik. ALFABETA, cv. Bandung.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republic Indonesia No 8 Tahun 2022 Tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2023.

Peraturan Menteri desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republic Indonesia No 7 Tahun 2023 Tentang rincian prioritas penggunaan dana desa.

Peraturan Menteri keuangan republic Indonesia No 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian dana desa setiap desa, penggunaan, dan penyaluran dana desa tahun anggaran 2025.

Roziq, Moh. Fachrur. (2022). *Implementasi Padat Karya Tunai Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember*. *8.5.2017*, 2003–2005.

Setiawan, R., Rusli, Z., & Mayarni, M. (2023). Implementasi Program Ketahanan Pangan. *FOKUS : Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, *21*(1). https://doi.org/10.51826/fokus.v21i1.723

Sugiyono (2009). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono (2022). Quantitative, Qualitative, and R&D Research Methods. 29th print Bandung Alfabeta

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta.

Tia, S. H. (2023). *Analisis Efektivitas Program Padat Karya Tunai (Pkt) Terhadap Pemanfaatan Dana Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. http://repository.radenintan.ac.id/28590/%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/28590/1/SKRIPSI 1-2.pdf

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa.

Wahab, S, A. (2008). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasike Implementasi Kebijaksanaan Negara,* BumiAksara, Jakarta

Wibawa, S, et al. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Wijaya, B, R., Susilo, S. (2006). *Kepemimpinan*. Yogyakarta: Andi Offset

Winarno, B. (2012). *Teori, Proses dan Studi Kasus Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS

TENTANG PENULIS